

**STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI UNTUK MENURUNKAN
TINGKAT KORUPSI DI DAERAH*****Corruption Prevention Strategies To Reduce The Level Of Corruption In The
Regions*****Bustami Abdul Rajak¹, Irfan ZamZam², Zulkifli Abu³****^{1,2,3}Universitas Khairun****Email: bustamiabdulrajak09@gmail.com****Abstract**

Corruption At The Local Government Level Remains A Major Challenge That Affects The Quality Of Public Services And The Effectiveness Of Development. This Study Aims To Assess The Effectiveness Of Corruption Prevention Strategies Implemented Through The Monitoring Center For Prevention (MCP) Program And The Integrity Assessment Survey (Survei Penilaian Integritas/SPI) In Tidore Islands City. The Research Employs A Descriptive Qualitative Approach, With Data Collected Through In-Depth Interviews, Observations, And Documentation From Key Informants, Including Local Government Officials, Inspectorate Auditors, And Community Representatives. The Results Indicate That The Implementation Of MCP And SPI Contributes To Strengthening A Culture Of Integrity, Transparency, And Accountability Within The Bureaucracy, As Reflected In The Increase Of The SPI Score From 68.44 To 73.24. However, The Effectiveness Of Corruption Prevention Efforts Still Faces Obstacles, Particularly Related To Limited Human Resources And Inconsistencies In Internal Supervision. This Study Concludes That Strengthening Internal Oversight Functions And Increasing Community Participation Are Crucial Aspects To Ensure The Sustainability Of Corruption Prevention Strategies At The Local Government Level.

Keywords: Corruption Prevention, Local Government, Monitoring Center For Prevention, Integrity Assessment Survey, Good Governance.

Abstrak

Korupsi Di Tingkat Pemerintahan Daerah Masih Menjadi Tantangan Besar Yang Berdampak Pada Kualitas Layanan Publik Serta Efektivitas Pembangunan. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menilai Sejauh Mana Strategi Pencegahan Korupsi Melalui Program Monitoring Center For Prevention (MCP) Dan Survei Penilaian Integritas (SPI) Di Kota Tidore Kepulauan Memiliki Efektivitas. Metode Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Pendekatan Kualitatif Deskriptif, Dengan Pengumpulan Informasi Melalui Wawancara Mendalam, Observasi, Dan Dokumentasi Dari Informan Kunci Yang Terdiri Dari Pejabat Pemerintah Daerah, Auditor Inspektorat, Serta Perwakilan Masyarakat. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Pelaksanaan MCP Dan SPI Berperan Dalam Memperkuat Budaya Integritas, Transparansi, Dan Akuntabilitas Dalam Birokrasi, Yang Terlihat Dari Peningkatan Skor SPI Dari 68,44 Menjadi 73,24. Namun, Efektivitas Pencegahan Korupsi Masih Menghadapi Hambatan, Terutama Berkaitan Dengan Kurangnya Sumber Daya Manusia Dan Konsistensi Dalam Pengawasan Internal. Kesimpulan Dari Penelitian Ini Adalah Bahwa Penguatan Fungsi Pengawasan Internal Serta Peningkatan Keterlibatan Masyarakat Merupakan Aspek Penting Untuk Memastikan Keberlangsungan Strategi Pencegahan Korupsi Di Tingkat Pemerintahan Daerah.

Kata Kunci: Pencegahan Korupsi, Pemerintahan Daerah, Monitoring Center For Prevention, Survei Penilaian Integritas, Tata Kelola Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan persoalan serius yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Peningkatan kewenangan yang diberikan kepada pejabat di tingkat lokal kerap kali membuka ruang bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Praktik korupsi di daerah tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung pada mutu pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat (Jaya, 2020). Penerapan sistem desentralisasi di Indonesia, yang memberikan otonomi luas kepada pemerintah daerah, turut memperumit permasalahan ini. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh budaya korupsi yang telah mengakar di sebagian masyarakat dan kalangan aparaturnya (Guntara, 2020).

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diterbitkan oleh Transparency International pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia memperoleh skor 34 dari skala 100. Capaian ini menunjukkan stagnasi dibandingkan tahun sebelumnya, bahkan posisi Indonesia turun ke peringkat 115 dari 180 negara. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang besar, meskipun berbagai kebijakan dan reformasi telah dijalankan. Skor 34 juga menempatkan Indonesia dalam kategori rendah, yang mencerminkan tingginya persepsi masyarakat terhadap praktik korupsi di sektor publik. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi masih berlangsung secara luas dan sulit dikendalikan, meskipun telah ada intervensi dari pemerintah dan lembaga terkait (Transparency International, 2023).

Pada tahun 2024, skor IPK Indonesia mengalami sedikit peningkatan menjadi 37, namun peringkat Indonesia tetap berada pada posisi 99 dunia. Meskipun terjadi kemajuan, Indonesia masih tertinggal dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia, dan Timor Leste. Negara-negara tersebut berhasil mencatatkan skor IPK yang lebih tinggi, yang menggambarkan tingkat korupsi yang relatif lebih rendah. Singapura, misalnya, secara konsisten menempati peringkat teratas dengan skor mendekati 90, sementara Timor Leste, meskipun merupakan negara yang relatif muda, mampu memperoleh skor yang lebih baik dibandingkan Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai langkah perbaikan telah dilakukan, Indonesia masih memerlukan strategi pemberantasan korupsi yang lebih terintegrasi dan terarah (Transparency International, 2024).

Kenaikan skor IPK pada tahun 2024 memberikan sinyal positif bahwa sebagian kebijakan pencegahan korupsi mulai menunjukkan dampak. Namun demikian, skor yang masih tergolong rendah menegaskan bahwa upaya yang dilakukan belum sepenuhnya optimal. Rendahnya IPK Indonesia disebabkan oleh praktik korupsi yang telah mengakar di berbagai sektor pemerintahan, mulai dari pengadaan barang dan jasa, proses perizinan, hingga pengelolaan anggaran. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan internal, penegakan hukum yang belum konsisten, serta budaya politik yang permisif terhadap korupsi di sejumlah daerah turut memperburuk situasi tersebut.

Peningkatan skor IPK mencerminkan adanya kemajuan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, namun tantangan besar dalam pemberantasan korupsi masih tetap ada. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang berorientasi pada pengawasan yang lebih ketat, penegakan hukum yang tegas,

serta pendidikan anti-korupsi yang berkelanjutan, baik bagi aparaturnya pemerintah maupun masyarakat. Pemanfaatan teknologi, seperti penerapan e-government dan e-procurement, dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan transparansi serta mempersempit ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Upaya tersebut harus didukung oleh komitmen bersama untuk menciptakan perubahan budaya birokrasi dan sosial secara berkelanjutan.

Berbagai kasus korupsi yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Dengan besarnya anggaran yang dikelola, pemerintah daerah sering menjadi lokasi terjadinya penyimpangan kewenangan dan pengelolaan keuangan yang tidak transparan. Proyek pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru kerap dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Fatimah et al., 2024). Di tingkat lokal, kebijakan pengawasan anggaran yang belum optimal, ditambah dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, sering kali menciptakan peluang terjadinya praktik korupsi (Fahrizal & Bintoro, 2022).

Korupsi di Kota Tidore Kepulauan menjadi salah satu contoh nyata permasalahan tata kelola pemerintahan daerah. Pada tahun 2024, Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID) tahap II tahun 2020 pada Dinas Pertanian, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp745 juta. Selanjutnya, pada awal tahun 2025, empat pejabat daerah, termasuk Kepala Dinas Kesehatan, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan Puskesmas Galala dengan kerugian negara mencapai Rp1,37 miliar. Rangkaian kasus ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah (Indotimur, 2025).

Korupsi di tingkat daerah sering kali dipengaruhi oleh pelaksanaan desentralisasi yang memberikan otonomi luas kepada pemerintah daerah. Otonomi tersebut, apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat, berpotensi menurunkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tingkat korupsi di daerah masih relatif tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab serta merumuskan strategi pencegahan yang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi daerah masing-masing (Hukum et al., 2024).

Salah satu kendala utama dalam upaya pemberantasan korupsi adalah kuatnya budaya korupsi di sejumlah daerah. Dalam beberapa kondisi, korupsi masih dianggap sebagai sesuatu yang lumrah atau dapat diterima oleh sebagian masyarakat dan pejabat daerah. Oleh karena itu, pencegahan korupsi tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya yang berkembang di masyarakat dan birokrasi. Strategi pencegahan harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya lokal agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan efektif dan diterima oleh masyarakat (Riwukore et al., 2020).

Peningkatan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) di Kota Tidore Kepulauan dari nilai 68,44 pada tahun 2023 menjadi 73,24 pada tahun 2024 menunjukkan adanya perkembangan positif. Kenaikan ini mencerminkan adanya

kemajuan dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan kota, serta menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat lokal. Meskipun demikian, Kota Tidore Kepulauan masih berada dalam kategori “Waspada”, yang menandakan bahwa risiko korupsi masih perlu mendapat perhatian serius. Untuk memperjelas perkembangan skor SPI dan MCP Kota Tidore Kepulauan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Tidore Tahun 2023 – 2024

Tahun	Skor SPI	Kategori
2023	68.44	Waspada
2024	73.24	Waspada (mengalami peningkatan)

Sumber: JAGA.ID KPK, Data SPI Kota Tidore Kepulauan

Tabel 1.2 Skor Monitoring Center For Prevention (MCP) Kota Tidore Tahun 2023 – 2024

Tahun	Skor MCP	Keterangan
2023	68,63	Lebih tinggi dibanding tahun 2024
2024	55,86	Mengalami penurunan signifikan

Sumber: JAGA.ID KPK, Data MCP Kota Tidore Kepulauan

Penurunan skor MCP dari sekitar 69 pada tahun 2023 menjadi 56 pada tahun 2024 menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan program pencegahan korupsi yang dipantau melalui instrumen MCP. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun persepsi integritas mengalami peningkatan, implementasi teknis pencegahan korupsi masih memerlukan penguatan agar selaras dengan hasil SPI yang membaik.

Meskipun demikian, kenaikan skor SPI mencerminkan arah perubahan yang positif menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Untuk mencapai perbaikan yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan perlu terus memperkuat penerapan prinsip-prinsip good governance, termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, pengawasan terhadap kebijakan dan proyek pembangunan, serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan.

Pencegahan korupsi di daerah membutuhkan pendekatan yang sistematis dan kolaboratif. Selain peran lembaga pemerintah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan dalam fungsi pengawasan. Peningkatan kesadaran publik terhadap dampak negatif korupsi dapat menciptakan tekanan sosial yang efektif untuk menekan praktik korupsi di tingkat daerah (Astuti et al., 2024). Di sisi lain, pemanfaatan teknologi seperti e-government dan e-procurement dapat meningkatkan transparansi dalam

pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa yang selama ini rawan penyimpangan.

Program pencegahan korupsi yang dikembangkan oleh KPK, seperti Monitoring Center for Prevention (MCP), dirancang untuk mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi di daerah. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen dan kesadaran pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan anti-korupsi. Meskipun banyak daerah telah berpartisipasi, tidak semuanya menunjukkan hasil yang optimal, yang menandakan bahwa efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal masing-masing pemerintahan daerah.

Korupsi di tingkat daerah juga berpotensi memperparah ketimpangan sosial yang sudah ada. Ketika anggaran daerah yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan publik disalahgunakan, kualitas hidup masyarakat menjadi terancam. Dampaknya antara lain terlihat pada terhambatnya pembangunan infrastruktur, rendahnya kualitas pendidikan, dan buruknya pelayanan kesehatan, yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah terpencil.

Pencegahan korupsi yang efektif juga memerlukan kerja sama erat antara pemerintah daerah dan sektor swasta. Keterlibatan sektor swasta dalam pengadaan barang dan jasa membuka peluang terjadinya praktik korupsi apabila tidak diawasi dengan baik. Oleh karena itu, pengawasan terhadap sektor swasta perlu diperkuat melalui penerapan kode etik yang jelas serta mekanisme pelaporan yang aman dan bebas dari intimidasi.

Dengan demikian, pencegahan korupsi di tingkat daerah harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, lembaga pengawas, hingga sektor swasta. Setiap pihak memiliki peran strategis dalam membangun budaya anti-korupsi dan memastikan bahwa anggaran serta kebijakan publik benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Tanpa komitmen bersama, upaya pemberantasan korupsi di daerah akan menghadapi hambatan yang signifikan.

Selain tantangan tersebut, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan daerah juga menjadi faktor yang memperburuk praktik korupsi. Banyak aparatur daerah yang belum mendapatkan pelatihan memadai terkait pengelolaan anggaran secara transparan dan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi hal yang sangat penting agar pejabat daerah mampu menjalankan tugasnya dengan integritas dan meminimalkan potensi korupsi (Taufik & Nurwahidah, 2023).

Penelitian sebelumnya oleh Astuti et al. (2024) mengkaji strategi pencegahan korupsi di daerah melalui analisis faktor internal dan eksternal menggunakan pendekatan SWOT dan QSPM. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komitmen pimpinan daerah merupakan kekuatan utama, sementara kelemahan terbesar terletak pada rendahnya fungsi pengawasan internal. Penelitian tersebut lebih berfokus pada perumusan strategi pencegahan secara umum di berbagai daerah. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menilai efektivitas implementasi kebijakan pencegahan korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) di Kota Tidore

Kepulauan, sehingga memberikan gambaran empiris mengenai kontribusi kedua instrumen tersebut dalam menekan praktik korupsi di tingkat daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang penyebab dan dampak praktik korupsi di tingkat pemerintahan daerah, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan pencegahan yang ada. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis, metode deskriptif analitis menurut (Sugiyono: 2009; 29) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. penulis dapat menyajikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi korupsi di Kota Tidore Kepulauan, baik dari perspektif internal pemerintahan daerah maupun masyarakat. Diharapkan, pendekatan ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang faktor-faktor yang menyebabkan korupsi dan peran kebijakan pencegahan dalam menurunkan tingkat korupsi.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994). Model ini menganggap analisis data sebagai proses yang interaktif, siklik, dan berkelanjutan, mencakup tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Tidore Kepulauan, periode penelitian direncanakan berlangsung selama tiga bulan, mulai dari September hingga November 2025. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya masalah korupsi yang signifikan di Kota Tidore Kepulauan, serta temuan kasus-kasus yang mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas di tingkat pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. Pemilihan lokasi didasarkan pada komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi serta penerapan kebijakan pencegahan korupsi berbasis digital melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai daerah kepulauan, Kota Tidore Kepulauan menghadapi tantangan geografis yang berdampak pada efektivitas koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Kondisi tersebut menjadikan digitalisasi birokrasi sebagai strategi penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola pemerintahan.

Secara administratif, Kota Tidore Kepulauan terdiri atas delapan kecamatan dengan jumlah penduduk sekitar 120.000 jiwa. Struktur perekonomian daerah ditopang oleh sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan pelayanan publik. Pemerintah daerah memegang peran sentral dalam pengelolaan pembangunan dan keuangan publik, sehingga penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kebutuhan utama. Dalam konteks tersebut, MCP dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi reformasi birokrasi yang mencakup aspek perencanaan,

penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengawasan internal, serta pelayanan publik. Meskipun demikian, implementasi kebijakan pencegahan korupsi masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga, serta resistensi budaya birokrasi terhadap perubahan.

Informan penelitian ditentukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterlibatan dan relevansi peran informan dalam pelaksanaan MCP dan SPI serta upaya pencegahan korupsi di Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Informan berasal dari unsur pimpinan organisasi perangkat daerah, aparat pengawasan internal pemerintah, dan masyarakat. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi, efektivitas, dan dampak kebijakan pencegahan korupsi dari perspektif penyelenggara pemerintahan maupun penerima layanan publik.

Temuan penelitian mengenai strategi pencegahan korupsi di Kota Tidore Kepulauan dianalisis berdasarkan empat dimensi utama, yaitu budaya integritas dan penguatan internal, implementasi dan evaluasi MCP dan SPI, efektivitas kebijakan pencegahan korupsi, serta strategi pencegahan dan inovasi kelembagaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan budaya integritas merupakan fondasi utama dalam upaya pencegahan korupsi. Integritas dipahami sebagai nilai yang mencerminkan kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan konsistensi antara kebijakan dan praktik aparatur sipil negara. Penguatan nilai tersebut dilakukan melalui pengawasan internal oleh Inspektorat, evaluasi rutin berbasis MCP, serta keteladanan pimpinan organisasi perangkat daerah. Dampak penguatan integritas tidak hanya dirasakan dalam peningkatan kepatuhan administratif, tetapi juga tercermin dalam persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang dinilai adil, terbuka, dan bebas dari praktik pungutan liar.

Implementasi MCP dan SPI di Kota Tidore Kepulauan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah dengan Inspektorat sebagai koordinator utama. MCP berfungsi sebagai instrumen pengendalian administratif dan keuangan, sementara SPI digunakan untuk mengukur persepsi integritas aparatur dan masyarakat. Penerapan kedua instrumen ini mendorong peningkatan disiplin pelaporan, transparansi penggunaan anggaran, serta koordinasi antarlembaga. Meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan beban administrasi, pemerintah daerah melakukan upaya perbaikan melalui pendampingan teknis, pelatihan, dan penguatan sistem pelaporan digital. Peningkatan skor SPI serta keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian menunjukkan kontribusi positif MCP dan SPI terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Efektivitas kebijakan pencegahan korupsi tercermin dari perubahan perilaku aparatur sipil negara yang semakin patuh terhadap prosedur, meningkatnya kualitas dan kecepatan pelayanan publik, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pengawasan internal yang konsisten mendorong organisasi perangkat daerah untuk menindaklanjuti hasil audit dan memenuhi standar akuntabilitas. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan masukan memperkuat pengawasan sosial sebagai pelengkap mekanisme pengawasan formal.

Strategi pencegahan korupsi di Kota Tidore Kepulauan berkembang melalui pendekatan preventif yang mengintegrasikan penguatan sistem pengawasan,

pembinaan integritas aparatur, dan inovasi berbasis digital. Digitalisasi MCP mewajibkan pelaporan kegiatan secara daring dan terintegrasi, sehingga meningkatkan transparansi dan meminimalkan peluang manipulasi data. Upaya peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan sosialisasi turut memperkuat kesadaran hukum dan etika birokrasi, khususnya dalam menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan sumber daya. Persepsi positif masyarakat terhadap kualitas layanan publik menunjukkan bahwa strategi tersebut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan akuntabilitas dan integritas pemerintahan daerah.

Secara keseluruhan, kebijakan pencegahan korupsi yang diterapkan di Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dapat dinilai efektif dalam memperkuat integritas birokrasi, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pemerintahan, serta membangun kepercayaan publik. Integrasi MCP dan SPI dengan pengawasan internal serta partisipasi masyarakat membentuk model pencegahan korupsi yang adaptif dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

1. Efektivitas Kebijakan Pencegahan Korupsi

Efektivitas upaya pencegahan korupsi di Kota Tidore Kepulauan melalui implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini terlihat dari kenaikan skor SPI dari 68,44 di tahun 2023 menjadi 73,24 pada tahun 2024, serta keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prestasi ini mengindikasikan bahwa sistem pengawasan dan akuntabilitas keuangan daerah beroperasi dengan lebih baik dan berkelanjutan.

Secara empiris, MCP berfungsi sebagai alat kontrol internal yang mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kepatuhan administrasi, keterbukaan dalam pengelolaan anggaran, serta ketepatan dalam melaporkan kegiatan. Peran Inspektorat sebagai pengawas internal menjadi kunci untuk memastikan kelengkapan dokumen dan keselarasan antara pelaksanaan kegiatan dengan indikator MCP. Dengan adanya evaluasi secara reguler dan tindak lanjut terhadap rekomendasi pengawasan, potensi penyimpangan bisa diminimalkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Fraud Pentagon, terutama pada elemen kesempatan dan kompetensi. Penerapan MCP mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi melalui pengawasan berbasis sistem dan bukti dokumen, sedangkan SPI meningkatkan kesadaran etika dan perilaku Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, kebijakan pencegahan korupsi tidak hanya berpengaruh pada kepatuhan formal, tetapi juga berkontribusi pada perubahan sikap birokrasi menuju tata kelola yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Namun demikian, efektivitas kebijakan ini belum merata di semua OPD. Perbedaan tingkat pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia masih menjadi penghambat, khususnya dalam penguasaan teknik pelaporan MCP serta penggunaan sistem digital. Keadaan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pencegahan korupsi sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan konsistensi dalam pengawasan internal.

2. Hubungan Budaya Integritas dan Efektivitas MCP dan SPI

Budaya integritas adalah elemen dasar yang berpengaruh besar terhadap suksesnya penerapan MCP dan SPI di Kota Tidore Kepulauan. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi perangkat daerah yang memiliki budaya integritas yang kokoh cenderung lebih rutin dalam pelaporan MCP dan mengalami peningkatan skor SPI. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, serta keteladanan dari pemimpin sangat mempengaruhi perilaku ASN untuk mematuhi peraturan dan mengutamakan kepentingan publik.

Penemuan ini dapat dijelaskan menggunakan Teori GONE, di mana budaya integritas berfungsi sebagai alat pengendalian internal yang dapat mengurangi faktor-faktor seperti ketamakan, kesempatan, kebutuhan, dan eksposur. Suasana kerja yang menghargai etika dan kiat sebagai teladan dari pemimpin akan mengurangi kemungkinan terjadinya rasionalisasi untuk perilaku yang menyimpang. Di samping itu, budaya integritas juga meningkatkan efektivitas pengawasan resmi yang dilakukan melalui MCP dan SPI.

Ada hubungan timbal balik yang memperkuat antara budaya integritas dan efektivitas MCP serta SPI. Budaya integritas yang baik mendorong kepatuhan dan meningkatkan mutu pelaksanaan MCP, sementara hasil dari evaluasi MCP dan SPI mendukung internalisasi nilai-nilai integritas di dalam organisasi. Oleh karena itu, pencegahan korupsi tidak hanya tergantung pada sistem pengawasan, tetapi juga pada pengembangan nilai dan etika dalam birokrasi.

3. Strategi Dan Inovasi Pencegahan Korupsi

Strategi untuk mencegah korupsi di Kota Tidore Kepulauan diterapkan melalui metode pencegahan yang menggabungkan peningkatan pengawasan internal, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi. MCP dan SPI berfungsi sebagai alat utama untuk menilai efektivitas pencegahan korupsi dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis data. Inovasi yang dilaksanakan mencakup digitalisasi proses pelaporan kegiatan, penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara online, audit yang berdasarkan risiko, serta dukungan teknis dari Inspektorat. Pendekatan ini sejalan dengan Teori Fraud Pentagon, terutama dalam mengurangi aspek peluang dan kompetensi, dengan cara memperketat sistem kontrol dan meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara mengenai peraturan dan etika publik.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan untuk pelayanan publik juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan lokal. Partisipasi masyarakat memberikan dorongan sosial yang positif dan mendorong Organisasi Perangkat Daerah untuk mempertahankan integritas dalam pelaksanaan tugasnya. Namun, tantangan masih ada, seperti terbatasnya infrastruktur digital dan keterampilan teknis ASN di daerah kepulauan.

Secara keseluruhan, langkah dan inovasi dalam pencegahan korupsi di Kota Tidore Kepulauan menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan sistem, budaya organisasi, dan teknologi dapat memperkuat usaha pencegahan korupsi secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai Strategi Pencegahan Korupsi untuk Mengurangi Tingkat Korupsi di Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, beberapa kesimpulan dapat diambil sebagai berikut:

1. Budaya integritas dan Pengutan Internal merupakan dasar penting dalam upaya mencegah praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Unsur-unsur seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan teladan dari para pemimpin memiliki peranan krusial dalam membangun karakter Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengedepankan etika serta pelayanan publik yang bersih.
2. Implementasi dan Evaluasi *Monitoring Center for Prevention* (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) terbukti efektif dalam meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Kenaikan skor SPI dari 68,44 menjadi 73,24 menandakan adanya perbaikan dalam persepsi integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. MCP dan SPI saling melengkapi, di mana MCP berfungsi sebagai pengawasan struktural dan SPI mencerminkan penilaian moral serta sosial.
3. Efektifitas kebijakan untuk mencegah korupsi menunjukkan hasil yang nyata, yang terlihat dari perubahan perilaku ASN, peningkatan kualitas layanan publik, serta keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Keberhasilan ini didukung oleh sistem pelaporan digital, audit yang berbasis risiko, serta peningkatan kapabilitas sumber daya manusia.
4. Strategi serta inovasi dalam pencegahan korupsi yang diterapkan bersifat preventif dan berkelanjutan, melalui pemanfaatan teknologi informasi, penguatan pengawasan internal, dan partisipasi masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan Teori Fraud Pentagon dan Teori GONE, yang menekankan pentingnya mengurangi peluang, rasionalisasi, dan kompetensi dalam mencegah korupsi.
5. Hubungan yang kuat antara budaya integritas dan efektivitas dari MCP dan SPI. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tingkat integritas tinggi menunjukkan kinerja pelaporan yang lebih baik dan komitmen yang lebih kuat terhadap nilai-nilai anti-korupsi. Ini menunjukkan bahwa perubahan budaya organisasi merupakan indikator keberhasilan pencegahan korupsi yang lebih signifikan dibandingkan dengan pencapaian administratif semata.

Secara keseluruhan, strategi pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dapat dianggap efektif, karena sanggup mengintegrasikan pendekatan moral, kelembagaan, dan teknologi untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M. P. (2023). Effectiveness of MCP in Overseeing Government's Internal Supervision: A Case Study of Riau's Local Governments. *APTISI Transactions on Technopreneurship*, 5(2), 190–204. <https://doi.org/10.34306/att.v5i2.305>
- Astuti, D. A. L., Winoto, J., & Suprehatin, S. (2024). Strategi Pencegahan Korupsi Untuk Menurunkan Tingkat Korupsi Daerah. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 10(1), 251–262. <https://doi.org/10.17358/jabm.10.1.251>

- Dewianti, A. F., Avrilia, D., Azizah, I. N., & Naila, Z. P. (2024). Ragam Korupsi dari Berbagai Definisi: Analisis Jenis dan Bentuknya. *Jurnal Edukasi Terkini*, 1(2), 49–55.
- Fahrizal, M. F., & Bintoro, Y. J. (2022). Desentralisasi Fiskal Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Kewirausahaan*, 19(1), 73. <https://doi.org/10.33370/jmk.v19i1.734>
- Fatimah, S., Yasin, M., Manan, A., Salmah, E., & Sriningsih, S. (2024). Analisis Variabel Determinan Tingkat Indikasi Korupsi Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 153–165. <https://doi.org/10.29303/sh.v1i1.955>
- Guntara, B. (2020). Maraknya Korupsi Di Pemerintahan Daerah Dalam Era Desentralisasi. *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1), 11–24. <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.813>
- Hukum, J. I., Riwanto, A., & Suryaningsih, S. (2024). *LOCAL GOVERNMENT CORRUPTION PREVENTION*. 9, 1–20.
- Iliyasu, R., & Etikan, I. (2021). Comparison of quota sampling and stratified random sampling. *Biometrics & Biostatistics International Journal*, 10(1), 24–27. <https://doi.org/10.15406/bbij.2021.10.00326>
- Indotimur. (2025). *Kejari Tidore tetapkan 4 tersangka kasus korupsi pembangunan puskesmas*. Indotimur.
- Jaya, N. A. (2020). Konstruksi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Berbasis Paradigma Good Financial Governance Di Indonesia. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 10(1), 24–43. <https://doi.org/10.26623/humani.v10i1.2096>
- Julpandi, Hatta, M., & Hamdani. (2024). Kedudukan Hukum Whistle-Blower Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 2(2), 487–507. <http://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/74>
- Nurhidayat, N., Nurmandi, A., & Misran, M. (2024). Evaluation of the Challenges of E-Government Implementation: Analysis of the E-Government Development Index in Indonesia. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 8(2), 371–383. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v8i2.52759>
- Pattimau, A. (2024). Analisis Implementasi Monitoring dan Evaluasi dalam Pencegahan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1432–1440. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2685>
- Permata Sari, I. W., Haskar, E., & Fajriyana Farda, N. (2024). Peran Pers Dalam Mempengaruhi Pemilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Bukittinggi Menjelang Tahun 2024. *Keadilan*, 22(1), 43–57. <https://doi.org/10.37090/keadilan.v22i1.1460>
- Prakoso, A. R. (2019). Efforts to Build Village Community Awareness in Supervising the Use of Village Funds. *Law Research Review Quarterly*, 5(1), 151–162. <https://doi.org/10.15294/snh.v5i01.32112>
- Radojicic, M., Jovanovic, P., Andjelic, O., & Matas, S. (2025). Can E-Procurement Be a Panacea for Upgrading the Competition and Efficiency in Public Procurement? *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, 2025(74), 108–129. <https://doi.org/10.24193/tras.74E.6>
- Rai Setiabudhi, I. K., & Arsha Putra, I. P. R. (2020). Surveillance Urgency to Prevent Village Fund Corruption. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana*

- Master Law Journal*), 9(3), 464.
<https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i03.p01>
- Riwukore, J. R., Manafe, H., Habaora, F., Susanto, Y., Yustini Strategi Pencegahan dan, T., Richset Riwukore, J., Manafe, H., Habaora, F., Susanto, Y., Tien Yustini, dan, Indo Global Mandiri Jl Jenderal Sudirman, U., Selatan, S., Pascasarjana Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan IPB Jl Raya Dramaga, S., Dramaga, K., Barat, J., Bina Insan Lubuklinggau Jl Jendral Besar Moh Soeharto, U. K., & Lubuk Linggau, K. (2020). Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur Strategies of Prevention and Eradication of Corruption in Kota Kupang Government, East Nusa Tenggara. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* |, 11(2), 2614–5863. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i2.1556>
- Rohmawati, W., Rahayu, W., Siburian, R. M., Sukmawati, D. R., & Chandra, R. (2024). Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 559–565. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1907>
- Sabani, A., Farah, M. H., & Sari Dewi, D. R. (2019). Indonesia in the spotlight: Combating corruption through ICT enabled governance. *Procedia Computer Science*, 161, 324–332. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.130>
- Saparman, Ridwan, Din, M., Jamaluddin, Laupe, S., Iqbal, M., & Betty. (2021). The Effect of Local Apparatus Competence, Financial Reporting Compliance and Internal Control Environment on Fraud Prevention: The Role of Local Assistants as Moderation Variable. *Proceedings of the International Conference on Strategic Issues of Economics, Business and, Education (ICoSIEBE 2020)*, 163(ICoSIEBE 2020), 57–60. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210220.011>
- Sari, F. S., & Kamayanti, A. (2021). Prevention of Accounting Fraud in the Village Government. *Proceedings of 2nd Annual Management, Business and Economic Conference (AMBEC 2020)*, 183(Ambec 2020), 185–190. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210717.038>
- Sugiyono. (2021a). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono, S. (2021b). The evaluation of facilities and infrastructure standards achievement of vocational high school in the Special Region of Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 25(2). <https://doi.org/10.21831/pep.v25i2.46002>
- Sukhemi, S., Sari, I. A. A., & Indriati, I. H. (2022). Determining Factors of Fraud in Local Government. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 1–8. <https://doi.org/10.32639/jiak.v11i1.13>
- Taufik, T., & Nurwahidah, N. (2023). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Perangkat Desa Sebagai Strategi Pencegahan Korupsi. *JPIN: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.47165/jpin.v6i1.479>
- Tory, T. F., & Hanum, R. A. (2025). *Nepotisme dan Korupsi di Pemerintahan Dalam Perspektif Etika*. 3.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- Transparency International. (2024). *Corruption Perceptions Index 2024*.



Transparency International. Transparency International.

<https://www.transparency.org/en/cpi/2024>

Wijayanti, A., & Kasim, A. (2022). Collaborative Governance Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) di Indonesia: Sebuah Studi Literatur. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 291–310.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.858>